

BAB II

RERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. IFRS (*International Financial Reporting Standard*)

IFRS (*International Financial Reporting Standard*) merupakan standar akuntansi internasional yang dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan internal perusahaan mengandung informasi yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat transparansi yang tinggi bagi para pengguna laporan keuangan, selain itu laporan keuangan tersebut juga dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan (Rohaeni dan Aryati, 2011). IFRS diterbitkan oleh sebuah lembaga independen di London yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, lembaga tersebut adalah IASB (*International Accounting Standard Board*). Barth et al (2008) dalam Rohaeni dan Aryati (2011) menyatakan bahwa IFRS yang merupakan standar internasional akan meningkatkan keseragaman laporan keuangan pada setiap negara yang tentunya akan membawa dampak baik bagi investor asing karena akan memudahkan investor dalam memperoleh informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi.

Proses pengadopsian IFRS yang dialami oleh beberapa negara melalui tahap yang berbeda-beda karena setiap negara memiliki karakteristik yang perlu disesuaikan dengan IFRS yang bersifat umum, sehingga adopsi IFRS tidak harus dilakukan secara penuh. Konvergensi IFRS memiliki arti menyelaraskan antara standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS (Chen, 2009) dalam

Rohaeni dan Aryati (2011). Negara-negara di dunia terbagi menjadi negara maju dan negara berkembang. Adopsi penuh IFRS dilakukan oleh beberapa negara maju, sedangkan untuk negara berkembang melakukan proses adopsi secara bertahap atau yang disebut dengan konvergensi IFRS.

Rohaeni dan Aryati (2011) menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan konvergensi IFRS negara-negara di ASIA terbagi menjadi tiga kelompok negara. Kelompok pertama adalah negara-negara yang sudah menerapkan IFRS, seperti Hong Kong dan Singapura. Kelompok kedua adalah negara-negara yang sedang dalam tahap pengadopsian IFRS, seperti Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan India. Sedangkan kelompok ketiga adalah negara yang tidak mengatur tentang penerapan IFRS, seperti Cina dan Vietnam. Konvergensi IFRS menjadi sebuah keharusan bagi setiap negara di dunia, hal ini dikarenakan penggunaan standar akuntansi berbasis IFRS telah menjadi perhatian khusus bagi lembaga di dunia seperti Bank Dunia (Immanuela, 2008). IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mendukung standar akuntansi internasional yang berlaku dengan melakukan upaya melalui adopsi IFRS di Indonesia (Soedarjono, 1998 dalam Immanuela, 2008). Salah satu alasan IAI mendukung penuh pengadopsian IFRS adalah karena Indonesia merupakan *full member* dari IFAC (*International Federation of Accountants*) dan juga anggota dari WTO (*World Trade Organization*).

Immanuela (2008) menyatakan bahwa penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di Indonesia. Format standar akuntansi akan berubah tetapi

tidak sampai mengubah substansi standar akuntansi keuangan. Adanya konvergensi IFRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Salah satu aspek penting dalam penilaian kualitas laporan keuangan adalah aspek komparabilitas (dapat diperbandingkan) dan relevansi nilai. Kualitas tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan antar negara dan untuk pengambilan keputusan oleh investor.

Di Indonesia, perusahaan yang sudah *listed* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun perusahaan yang sedang dalam proses pendaftaran di BEI wajib menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sesuai dengan IFRS setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009). Proses pengadopsian IFRS di Indonesia dilakukan dalam tiga tahap mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tahap adopsi pertama pada tahun 2008 sampai tahun 2010 merupakan tahap awal mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengadopsian IFRS dan adopsi seluruh IFRS ke PSAK. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahun 2011 merupakan tahap persiapan akhir segala infrastruktur yang dibutuhkan dan mulai melakukan penerapan beberapa PSAK berbasis IFRS yang dilakukan secara bertahap. Tahap akhir yaitu pada tahun 2012 merupakan tahapan penerapan penuh seluruh PSAK yang sudah dikonvergensi berbasis IFRS, penerapan standar baru ini ditetapkan IAI mulai berlaku mulai 1 Januari 2012 (Nugrahanti, 2014).

B. Teori Agensi

Struktur kepemilikan dalam perusahaan menimbulkan konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemilik, baik itu struktur kepemilikan manajerial maupun institusional. Teori yang dapat menjelaskan keadaan ini adalah teori agensi. Hadad, dkk (2003) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontrak antara pihak *principal* dengan agen. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak untuk menjalankan perusahaan. Hubungan agensi tercipta ketika seorang pemilik atau yang disebut dengan *principal* memberikan wewenang kepada pihak lainnya yang disebut dengan agen untuk menjalankan kegiatan perusahaan atas nama pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan agensi memiliki kepentingan individual yang menyebabkan kesenjangan atau bahkan bisa menjadi konflik antara *principal* dan agen. *Principal* sebagai pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya di perusahaan dan menginginkan pihak manajemen untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan secara optimal. *Principal* selaku pemilik perusahaan memiliki motivasi jangka panjang untuk kelangsungan perusahaan. Namun berbeda dengan agen yang tidak selalu selaras dengan *principal*, agen cenderung memaksimalkan profit agar kondisi perusahaan terlihat baik untuk saat tertentu atau jangka pendek namun tidak mementingkan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Hadad dkk, 2003).

Selain masalah kepentingan, asimetri informasi juga menjadi permasalahan yang timbul dalam hubungan agensi. Rahmawati dan Baridwan (2012) mendefinisikan asimetri informasi sebagai kesenjangan atau ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak *principal* dan agen. Agen selaku pihak yang menjalankan aktivitas perusahaan secara langsung memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal* yang hanya melakukan pengawasan. Agen memiliki akses informasi yang lebih akurat dibandingkan *principal*, hal ini sering dimanfaatkan oleh agen untuk melakukan manajemen laba. Sikap *principal* yang hanya melakukan pengawasan namun menuntut kinerja yang optimal dari agen membuat agen cenderung akan melakukan manajemen laba supaya kondisi perusahaan terlihat baik untuk memenuhi keinginan *principal*.

C. Struktur Kepemilikan Perbankan

Struktur kepemilikan perusahaan dikategorikan menjadi struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan institusional, begitu pula dalam sektor industri perbankan. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen perusahaan itu sendiri yaitu para manajer. Fungsi dari kepemilikan manajerial adalah untuk menjaga keselarasan tujuan perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin tinggi sikap kehati-hatian manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini dikarenakan akibat dari keputusan yang diambil akan berdampak pada pihak manajemen yang juga memiliki kontribusi dalam

kepemilikan saham perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal perusahaan dapat berupa perusahaan keuangan maupun non keuangan seperti perusahaan bank dan perusahaan investasi. Fungsi kepemilikan institusional adalah sebagai pengawasan. Pengawasan yang dimaksudkan adalah pengawasan dari pihak investor terhadap pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Struktur kepemilikan Institusional merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2005 dalam Palestine 2009). Pemegang saham memiliki tujuan yang bersifat *profit motives* yang artinya pemegang saham hanya menginginkan profit dan hanya mementingkan nilai pengembalian atas investasinya, oleh sebab itu pemilik menginginkan pihak manajemen supaya mengoptimalkan sumber daya yang ada pada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Konflik perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dapat diatasi dengan adanya struktur kepemilikan institusional yang akan mengatur aktivitas perusahaan keuangan.

Secara umum struktur kepemilikan institusional pada industri perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu bank milik pemerintah dan bank milik swasta (Anggarita, 2012). Bank milik pemerintah adalah Bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sedangkan Bank milik swasta adalah Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Bank-bank milik pemerintah di Indonesia jika dibedakan berdasarkan struktur kepemilikannya dapat dibedakan menjadi Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang artinya adalah milik pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang artinya adalah Bank milik pemerintah daerah setempat. Contoh Bank milik BUMN antara lain adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan Bank milik pemerintah daerah antara lain adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, dan Bank Jatim. Bank milik swasta dibedakan menjadi dua, yaitu swasta nasional dan swasta asing. Bank milik swasta nasional adalah Bank yang dimiliki oleh pihak swasta yang berwarganegara Indonesia dan berdomisili di Indonesia seperti Bank Pundi Indonesia. Sedangkan Bank milik swasta asing adalah Bank yang kepemilikan saham oleh pihak asing diatas 40% seperti Citibank, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Danamon.

Barth (2002) dalam Anggarita (2012) dalam penelitiannya menyampaikan beberapa fakta mengenai struktur kepemilikan bank. Pertama, kepemilikan bank oleh perusahaan non keuangan tidak akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Kedua, inovasi di sektor perbankan akan cenderung lambat jika sebagian besar industri perbankan dikendalikan oleh bank pemerintah. Ketiga, perkembangan bank akan semakin lambat dan pelaksanaan sistem keuangan bank akan semakin buruk jika kepemilikan pemerintah terhadap bank semakin besar. Keempat, bukti empiris memperlihatkan bahwa di negara-negara yang memiliki banyak bank-bank maju (*developed banks*), kepemilikan bank oleh pemerintah di negara tersebut cenderung sedikit. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan bank oleh pemerintah berhubungan negatif dengan perkembangan keuangan.

D. Manajemen Laba

Schipper (1989) dalam Wisnumurti (2010) menyatakan bahwa manajemen laba adalah sebuah intervensi atau campur tangan dari pihak manajemen perusahaan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Intervensi ini dilakukan dalam proses pelaporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan. Tindakan seperti ini akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih rendah karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan realitas atas keadaan perusahaan yang sebenarnya. Terlepas dari tujuan pribadi masing-masing pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba, tujuan utama dilakukannya manajemen laba adalah untuk membuat seolah-olah kinerja manajemen terlihat baik. Healy (2001) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang akan menyesatkan *stakeholders* menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari praktik manajemen laba mengandung informasi yang menyesatkan bagi para investor, sehingga dapat membuat investor mengambil keputusan yang salah dalam investasi.

Gamayuni (2009) menyatakan bahwa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia memberikan kelonggaran kepada manajer dalam memilih kebijakan akuntansi yang akan diterapkan di perusahaannya dalam rangka proses pelaporan keuangannya. Tujuan dari pemberian kelonggaran bagi manajer

dalam memilih kebijakan akuntansinya adalah supaya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan terutama dalam pelaporan labanya dapat mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya sesuai dengan realita yang ada. Namun fleksibilitas atau kelonggaran yang dimiliki oleh manajer ini malah justru dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba atau perekayasaan laba dengan tujuan membuat laporan keuangan yang bagus untuk menarik minat investor. Wisnumurti (2010) mengemukakan berbagai cara yang dilakukan oleh manajer dalam melakukan manajemen laba, diantaranya adalah melakukan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya serta mempercepat atau menunda pendapatan dan biaya.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya praktik manajemen laba adalah sektor industri. Sektor industri menentukan karakteristik dari perusahaan-perusahaan yang ada didalamnya. Selain itu sektor industri juga menentukan regulasi mana yang harus dijalankan oleh perusahaan. Di Indonesia regulasi yang diterapkan untuk perusahaan dikategorikan sesuai dengan jenis sektor industrinya. Masodah dan Wardani (2011) menyatakan bahwa untuk melindungi sektor industri tertentu, di negara berkembang terdapat kecenderungan intervensi dari pemerintah yang cukup tinggi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk membatasi aktivitas perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian di suatu negara.

Dalam sektor industri perbankan terdapat karakteristik yang berbeda dengan industri lainnya, salah satunya adalah persyaratan dari BI mengenai modal yang diharuskan tidak boleh berada di bawah Capital Adequacy Ratio (CAR). Selain itu industri perbankan juga memiliki tingkat regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain. Regulasi ketat yang diterapkan di industri perbankan diharapkan dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan bank, sehingga kepercayaan nasabah maupun investor juga dapat meningkat. Yulia (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang ada dalam industri perbankan lebih banyak melakukan manajemen laba dibandingkan sektor industri lain. Hal ini dikarenakan bank adalah industri yang memiliki tingkat regulasi tinggi, sehingga untuk pemenuhan beberapa syarat yang harus dipenuhi perbankan untuk tetap menjaga kredibilitasnya maka pihak manajemen dari perusahaan perbankan melakukan praktik manajemen laba untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh BI tersebut. Selain itu industri perbankan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat, namun di sisi lain bank juga merupakan jenis perusahaan yang berisiko tinggi, sehingga perusahaan perbankan melakukan manajemen laba untuk memberikan informasi keuangan yang baik dimata investor dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

E. Penurunan Hipotesis

1. IFRS dan Manajemen Laba

Beberapa hasil penelitian terdahulu mayoritas menyatakan bahwa konvergensi atau pengadopsian IFRS terbukti berhubungan negatif dengan manajemen laba. Beberapa penelitian tersebut diantaranya menggunakan

sampel perusahaan di negara maju dan ada pula yang menggunakan sampel perusahaan di negara berkembang, namun hasilnya adalah sama. Artinya proses pengadopsian IFRS baik yang dilakukan secara langsung *full adoption* pada negara maju maupun adopsi secara bertahap (konvergensi) pada negara berkembang sama-sama membawa perubahan yang baik terhadap standar akuntansi yang diterapkan di sebuah negara. Secara teoritis perubahan standar akuntansi berbasis IFRS dapat menurunkan praktik manajemen laba.

Standar akuntansi berbasis IFRS menggunakan *principal based*. Nilai wajar dan pengungkapan yang lebih rinci akan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Tujuan diberlakukannya *principal based* adalah supaya setiap perusahaan bisa mengaplikasikan standard yang berlaku sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan yang berbeda, namun hal ini bisa disalahgunakan oleh para manajer. Penggunaan *principal based* berarti mengatur hal-hal yang bersifat prinsip, bukan hal-hal yang bersifat rinci. Hal ini dapat dijadikan peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui akun akrual. Sebagai contoh dalam penentuan sewa pembiayaan, apabila menggunakan aturan *rule based* maka suatu sewa dapat dikategorikan sebagai sewa pembiayaan apabila masa sewa minimal 75% dari umur ekonomis barang sewaan. Aturan tersebut dijelaskan secara rinci dan berlaku untuk seluruh perusahaan. Apabila menggunakan *principal based* maka syarat pengelompokan sewa pembiayaan tidak disebutkan batasan 75% secara jelas, namun prinsip ini

lebih mengatur dalam hal substansi sewa. Sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan apabila manfaat dan risiko dari barang sewaan secara substansial berpindah ke penyewa. Masa sewa bisa menjadi salah satu indikator penentuan sewa pembiayaan namun tidak disebutkan garis batas yang jelas 75% melainkan menggunakan penjelasan bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset.

Ahmar (2016) menyatakan bahwa pengadopsian IFRS kedalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia mampu menurunkan praktik manajemen laba yang dilakukan melalui akun akrual perusahaan. Fenomena pelanggaran prinsip akuntansi dalam melakukan manajemen laba ini dapat diatasi dengan karakteristik IFRS yang selanjutnya, yaitu menggunakan nilai wajar dan melakukan pengungkapan yang lebih rinci. Penggunaan nilai wajar dalam standar berbasis IFRS akan membantu perusahaan agar tidak bias dalam menilai suatu aset. Metode penilaian aset sebelum adopsi IFRS menggunakan *book value* atau nilai buku yang ditentukan menggunakan model penghitungan *historical cost* yaitu berdasarkan harga pembelian dikurangi dengan nilai penyusutannya. Hal ini dapat menyebabkan bias karena penilaian terhadap satu aset bisa berbeda antar perusahaan. Penggunaan nilai wajar dalam menilai suatu aset dapat menjawab permasalahan ini karena nilai wajar akan cenderung menyeragamkan penilaian atas suatu aset di setiap perusahaan.

Utami (2016) menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih rinci akan membatasi pilihan-pilihan metode akuntansi yang digunakan. Hal ini akan membatasi intervensi yang berlebihan dari pihak manajemen dalam mengatur laba. Pengungkapan yang lebih rinci akan meningkatkan kualitas laporan keuangan karena informasi keuangan yang disampaikan kepada pihak pengguna laporan keuangan akan lebih jelas dan terperinci. Selain itu penggunaan standar akuntansi berbasis IFRS yang secara substansial sama di berbagai negara akan memudahkan investor atau *stakeholder* lain dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba. Ewert dan Wagenhof (2005) dalam Farahmita (2012) menyatakan bahwa standar akuntansi yang semakin ketat dapat menurunkan manajemen laba dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang menguji hubungan antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Diantaranya adalah Barth *et al.* (2008) dalam Rohaeni dan Aryati (2011) yang meneliti tentang perbedaan kualitas akuntansi antara sebelum dan sesudah dikenalkannya IFRS. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang secara sukarela sudah mengadopsi IFRS antara tahun 1994 dan 2003, sampel yang didapat sejumlah 327 perusahaan yang tersebar di 21 negara. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa setelah IFRS diperkenalkan menyebabkan praktik manajemen laba menjadi turun, sehingga dapat disimpulkan bahwa adopsi IFRS berhubungan negatif dengan manajemen laba.

Peneliti lain yang sudah melakukan penelitian mengenai dampak pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba adalah Morais dan Curto (2008) dalam Rohaeni dan Aryati (2011) yang melakukan penelitian dengan mengambil sampel di negara Portugal sebanyak 34 perusahaan dengan periode akuntansi sebelum adopsi IFRS yaitu tahun 1995-2004, periode setelah adopsi IFRS yaitu tahun 2004-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sesudah adopsi IFRS dilakukan, perusahaan terbukti lebih sedikit melakukan praktik manajemen laba.

Di Indonesia, peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai dampak konvergensi IFRS terhadap manajemen laba adalah Rohaeni dan Aryati (2011). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 201 perusahaan manufaktur periode 2006-2010 dengan asumsi bahwa konvergensi IFRS terjadi mulai tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi IFRS terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, artinya setelah adanya konvergensi IFRS di Indonesia dapat menurunkan praktik manajemen laba di perusahaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba di Perbankan

2. Struktur Kepemilikan Bank dan Manajemen Laba

Healy (2001) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa praktik manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan tertentu dalam hal pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan investor menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba terjadi akibat adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manajemen perusahaan terhadap pelaporan laba yang akan dilaporkan. Tingkatan sejauh mana pihak manajemen mengintervensi praktik manajemen laba dipengaruhi oleh struktur kepemilikan suatu perusahaan. Apabila kepemilikan manajerial atau kepemilikan saham oleh pihak manajemen di suatu perusahaan cukup besar, maka ada kecenderungan praktik manajemen laba akan menurun, karena pihak manajemen merasa memiliki tanggungjawab yang lebih besar terhadap kelangsungan jangka panjang perusahaan.

Pada industri perbankan struktur kepemilikan institusional pada perusahaan yang didominasi oleh pemerintah dan investor asing memiliki orientasi pengawasan yang berbeda. Bank dengan struktur kepemilikan institusional dengan mayoritas investor asing dan domestik yang tergolong sebagai bank swasta memiliki tujuan atau kepentingan tersendiri dari masing-masing pemilik perusahaan. Orientasi pengawasan terhadap aktivitas bisnis perusahaan bank swasta adalah orientasi bisnis, sehingga intervensi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba demi

mencapai tujuan tertentu di dalam perusahaan perbankan swasta cukup besar demi mencapai keuntungan yang maksimal. Sedangkan perusahaan perbankan dengan struktur kepemilikan institusional yang mayoritas adalah pemerintah dalam melakukan pengawasan cenderung berorientasi pada tanggungjawab kepada publik. Selain itu pengawasan dari pihak pemerintah terkait dengan regulasi yang ditetapkan juga lebih ketat, sehingga intervensi dari pihak manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba pada perusahaan perbankan dengan struktur kepemilikan pemerintah cenderung lebih rendah.

Bank yang memiliki struktur kepemilikan mayoritas investor asing akan cenderung melakukan manajemen laba. Hadid, dkk (2003) menyatakan bahwa investor asing memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi atas investasinya. Investor asing berasumsi bahwa investasi di negara lain merupakan bisnis, tidak ada campur tangan rasa tanggungjawab terhadap publik. Karena itu Bank swasta yang kepemilikannya didominasi oleh investor asing cenderung lebih maju dibandingkan dengan Bank milik pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan adanya hubungan antara struktur kepemilikan dan manajemen laba. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2009) yang meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur di Indonesia pada satu periode akuntansi yaitu tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

baik struktur kepemilikan institusional maupun struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, artinya semakin besar proporsi struktur kepemilikan institusional dan manajerial akan mengurangi praktik manajemen laba.

Palestin (2009) juga meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode pelaporan akuntansi 2003-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, artinya semakin besar proporsi struktur kepemilikan institusional dan manajerial akan menurunkan praktik manajemen laba.

Wahyuningsih (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang ada di sektor industri perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode akuntansi 2004-2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena sebagian sampel adalah pada perusahaan perbankan milik pemerintah, sehingga aktivitas akuntansi yang dilakukan cenderung stabil dan dibawah regulasi yang ketat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di perbankan. Hal ini membuktikan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pengawasan

terhadap manajemen perusahaan sangat ketat dan patuh terhadap regulasi yang diterapkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H2a : Struktur Kepemilikan Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Perbankan**
- H2b : Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba Perbankan**